

MAHASISWI DALAM JERAT PEKERJAAN SEKS KOMERSIAL (KETIKA PENDIDIKAN MENCERMINKAN KELANGSUNGAN HIDUP TRANSAKSIONAL)

Dahlia Rahma Muhajir Nainggolan¹, Sakila Salwa Habiba², Fa Aisyah Nura³, Dhea Ananda Kurniawan⁴, Hany Hafizhah Putri⁵, Chalisa Salsabila⁶, Nurhayati⁷
dahliarahma567@gmail.com¹, sakilaslwaa@gmail.com², faaisyahnura@gmail.com³,
dhea4844@gmail.com⁴, hanyhafizhahputri@gmail.com⁵, chalisasalsa18@gmail.com⁶,
nurhayati1672@uinsu.ac.id⁷

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Dalam panjangnya waktu yang manusia habiskan demi ilmu, ada kalanya ketidakadilan terus berpihak. Fakta mengenai gelapnya dunia Pendidikan dan akademisi tidak lagi harus ditutupi. Sudah saatnya keterbukaan mengenai dunia Pendidikan sehingga mampu menghasilkan kritik sosial yang berkualitas. Parameter ketidakadilan dalam dunia Pendidikan menurut filsuf Aristoteles berada pada sumber daya Pendidikan. Namun tidaklah mampu membohongi indra, bahwa tidak ada jaminan mutlak bagi setiap manusia untuk mendapat Pendidikan yang layak. Sehingga beberapa hal harus dilanggar demi gelar, gaji, atau sebangkah nilai. Adat mampu mengintimidasi alasan-alasan yang digunakan untuk melencengkan kebenaran. Fenomena sensitif ini tidak bisa luput dari pandangan akademisi. Komoditas yang merajalela jelas harus mendapat kritikan yang layak.

Kata Kunci: Perempuan, Seks, Pendidikan, Moral.

ABSTRACT

In the long time that humans have spent for knowledge, there are times when injustice continues to side. The fact about the darkness of the world of education and academics must no longer be covered up. It is time for openness about the world of education so that it can produce quality social criticism. The parameters of injustice in the world of education according to the philosopher Aristotle are in educational resources. However, it is not able to lie to the senses, that there is no absolute guarantee for every human being to get a decent education. So some things must be violated for the sake of a title, salary, or a lump of value. Custom is able to intimidate the reasons used to distort the truth. This sensitive phenomenon cannot escape the view of academics. Rampant commodities clearly must receive proper criticism.

Keywords: Women, Sex, Education, Morals.

PENDAHULUAN

Pendidikan formal adalah harta karun yang tercipta sejak beberapa ribu tahun untuk mendisiplinkan umat manusia. Telah ribuan tahun kehancuran dan manusia menertibkan diri dalam bentuk data-data dan disiplin ilmu formal. Kemudian membentuk sistem dan bangunan dengan garis besar jelas. Memberi gedung dengan manusia-manusia muda dan manuskrip-manuskrip. Ribuan tahun manusia menjunjung tinggi ilmu sebagai mahkota kehormatan. Dan sampailah kita sekarang di zaman dimana kampus-kampus digunakan hanya sebagai transisi menuju dunia kapitalis. Maka tidak jarang adanya kasus tidak etis dimana uang menguasai isi kampus. Kita hidup di era saat ilmu pengetahuan disetarakan dengan uang. Para cendekiawan yang diharap mampu membuka cahaya pengetahuan, kini justru terperangkap diantara garis tipis antara ilmu dan uang. Pada masanya, umat manusia sempat begitu kagum pada pengetahuan dan menempatkan ilmu pengetahuan lebih tinggi dari emas.

Demikianlah sejarah mengulang dirinya sendiri. Manusia kembali masuk dalam era paradoks. Bangsa kita adalah kumpulan orang-orang munafik. Sebab kejujuran adalah bagian dari kehormatan, maka jujurlah kita pada institusi pendidikan; bahwa masih banyak

Perempuan muda yang menjual tubuhnya. Ini bukan sekadar masalah akademik, tetapi moral. Ini bukan tentang tubuh yang ingin dihargai, melainkan tentang keberadaan yang ingin diakui.

Ada banyak kronologi yang mengubah cara kita hidup. Beberapa kejadian menusuk batin hingga mengubah arti hidup seseorang. Barangkali seperti itu yang terjadi pada setiap manusia. Tidak lepas dari manusia yang terlihat sempurna secara akademik. Faktanya akan ada banyak luka yang setiap individu tanggung. Mereka berjalan sibuk dalam ruang kelas. Menutupi kekosongan dan ketidakutuhan dengan wajah rupawan. Barangkali sebagai manusia, begitulah cara mereka bertahan hidup. Membawa segores luka, melumpuhkan rasa malu, menyembunyikan harga diri demi harga transaksional yang tidak sepadan.

Hedonisme tidak bisa kita singkirkan sebagai salah satu penyebab utamanya. Tuntutan gaya hidup, pasar global, keinginan untuk diakui, kebanggaan akan menjadi yang nomor satu, kerap kali mendukung para pelajar (utamanya mahasiswi) untuk mengikuti transaksi yang immoral.

Manusia beranggapan bahwa mereka ada. Dan suatu keberadaan berhak untuk dibuktikan. Ambisi untuk mendominasi realitas telah membawa kita ke zaman dimana segalanya bisa dilihat, dijual, dan dimiliki. Termasuk nilai dan moral atau capaian pendidikan itu sendiri.

Pendidikan tinggi kerap akrab sebagai gerbang menuju mobilitas sosial, tetapi bagi sebagian mahasiswi, dunia perkuliahan justru menjadi arena pertarungan hidup dan mati. Menjadi gamang antara harga diri atau nyawa sendiri. Memilih antara hidup berlutut atau mati berdiri. Inilah kemudian yang menjadi keresahan dalam dunia Pendidikan. Isu ini yang menjadi tanggung jawab besar segenap perempuan, akademisi, pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena mahasiswi yang terlibat dalam pekerjaan seks komersial (PSK) menguak paradoks kelam: Ketika beban ekonomi hingga tekanan akademik telah mengubah kampus dari ruang intelektual menjadi ruang eksploitasi. Lahirnya tulisan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan atau melucuti moral kaum tertentu, melainkan menjadi gerbang baru akan kesadaran mengenai kepelacuran dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bermaksud mengurai kompleksitas fenomena tersebut.

Meskipun dalam setiap kutipan, data pasti sulit diperoleh karena sifatnya yang sensitif dan penuh stigma, sejumlah laporan lembaga masyarakat, riset terbatas, dan pemberitaan media, sempat menyoroti tren yang mengkhawatirkan ini. Misalnya survei BKKBN (2022) menyoroti adanya 21% pekerja seks di wilayah Jabodetabek berstatus pelajar atau mahasiswa.

Memahami fenomena ini bukan untuk mengesahkan atau menghakimi, melainkan untuk membongkar akar masalah yang seringkali tersembunyi di balik stigma dan moralitas sempit. Penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dengan membuka perspektif yang lebih terbuka dan jujur mengenai kerentanan kelompok perempuan terdidik dalam lingkungan sosial-ekonomi yang penuh tekanan.

Program dukungan psikologis yang efektif, dan kampanye kesadaran yang mengurangi stigma serta mendorong pendekatan berbasis pemberdayaan dan pencegahan daripada sekadar pembinaan moral atau kriminalisasi. Dengan demikian, jurnal ini berupaya penuh dalam menggeser narasi penghakiman atas tindakan dan berfokus menuju pemahaman yang lebih terbuka.

METODE PENELITIAN

Melihat betapa rentannya Perempuan dan membandingkan dengan pentingnya keterbukaan mengenai isu ini, jelas cukup rumit untuk menentukan metode penelitian serta

teori. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan kepustakaan, jurnal, artikel, survei dan data untuk melindungi kaum Perempuan. Cara ini dinilai lebih etis daripada harus menggunakan metode fenomenologi. Dengan memperhatikan etika penelitian dan keabsahan tulisan, jurnal ini diharap mampu menjaga prinsip dan non-judgmental.

Mengetahui betapa rumitnya isu ini, justru membuat kami menemukan banyak teori pendukung di dalamnya. Antara lain; (1) Teori Feminis Kritis, (2) Teori Strain, dan (3) Teori Kapital Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

fenomena mahasiswa yang terlibat dalam pekerjaan seks komersial di Indonesia merupakan wujud nyata dari kompleksitas akibat interaksi factor structural, kultural, dan psikologis. Berdasarkan data yang tersedia, temuan mengungkapkan adanya pola sistematis sebagai berikut:

a) Tekanan Ekonomi

Biaya hidup dan Pendidikan terus mencekik masyarakat. Inflasi terus tumbuh dan menjalar di perkotaan, sementara upah masih berada di angka tetap. Tekanan ekonomi yang menimpa masyarakat, belum lagi kebijakan politik yang membuat upah hanya bertahan dari pajak ke pajak, menjadikan pekerjaan seks komersial sebagai jembatan untuk memenuhi standar ekonomi yang semakin tinggi. Ini adalah bentuk kerusakan structural yang semakin membuat Perempuan rentan, dan memicu kemarahan di masyarakat. Survei BPS (2023) menunjukkan inflasi Pendidikan mencapai 4.5% di perkotaan, sementara upah pekerja paruh waktu mahasiswa (misal: ojek online, atau pelayan restoran) hanya Rp1.800.000-2.500.000 juta/bulan. Data ini jelas membuktikan bahwa angka itu tidak cukup untuk biaya Pendidikan di perguruan tinggi. Dalam riset LSM Sahabat Perempuan (2022) menyatakan bahwa 68% responden mahasiswi mengaku terlibat PSK karena “tidak sanggup membayar SPP” atau “orangtua kehilangan pekerjaan saat pandemi”. Seorang mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (samaran “Dina”) bercerita:

“Ayah PHK di masa COVID, adik 3 orang. Pilihan saya: DO atau cari cara bayar kuliah... Pacar perkenalkan saya ke tante-tante yang bayar

Rp2.000.000-5.000.000 juta/malam.”

b) Gaya Hidup Konsumtif dan pengaruh media sosial

Fenomena luxury display di Instagram/Tiktok menciptakan tekanan psikologis khususnya bagi mahasiswi atas standar hidup yang tidak realistis. Kebiasaan membeli barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan semakin marak dengan kemajuan teknologi saat ini. Isi yang ditampilkan pada media sosial jelas mendorong gaya hidup mewah dan menjadi pemicu hadirnya sikap hedonism terutama dalam kalangan mahasiswi. Media sosial sering menampilkan bentuk kehidupan yang utopis, dan inkonsisten dalam menampilkan iklan.

Pengaruh media sosial jelas tidak berhenti pada standar hidup, tetapi juga validasi sosial. Hal ini menjadikan media sosial sebagai tempat transaksi paling mudah yang bisa ditemui. Akibatnya, banyak manusia yang menjual kecantikan dan dibayar dengan pujian. Atau menjual gambar tubuh dengan imbalan mendapat komentar positif atau sekadar *like* dari pengguna media sosial lain. Aktivitas jual-beli yang tidak kita sadari ini kemudian menjadi maklum bagi masyarakat. Sehingga begitu mudah membuka pintu yang lebih bebas.

Penelitian UGM (2021) terhadap 200 mahasiswi Yogyakarta menemukan 41% responden merasa “tersisihkan” karena tidak mampu mengikuti tren fashion atau kuliner. Dari hal itu, mulai muncul rasa keharusan untuk mengikuti jejak lingkungan berdasarkan

tren media sosial. Aplikasi kencan seperti Tinder atau Sugarbook menjadi pintu masuk
“Saya kenal sugar daddy pertama dari aplikasi kencan, dia tawar Rp3.000.000 untuk kencan makan malam plus...”

Awalnya ngeri, tapi lihat teman kuliah pakai tas branded, akhirnya saya iyaikan.”

(Wawancara dengan “Maya” mahasiswi swasta di Depok, 2023)

c) Kerentanan Sosial-Budaya

Stigma kegagalan seperti budaya “tidak boleh mengeluh” menjadi pendorong bagi mahasiswi untuk menelan sendiri penderitaannya. Termasuk kegagalan ekonomi yang menimpa mahasiswa. Diperparah oleh minimnya dukungan keluarga, terkhusus mahasiswi migran. Hal ini semakin memperburuk kerentanan yang mungkin terjadi pada setiap perempuan. Dua hal diatas merupakan hal yang masih sulit dibedah dan diakui oleh lapisan masyarakat. Kurangnya dukungan dan budaya yang keras, menjadikan banyak dari mahasiswi kurang mendapat perlakuan manusiawi, yang akibatnya menjadi bagian dari pemicu atas pertanyaan mengapa mahasiswi rela menjual tubuhnya.

d) Kegagalan Sistem Kampus

Dalam pandangan kacamata kebenaran, fenomena ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak kampus. Karena melibatkan faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan kebijakan pendidikan nasional. Beberapa faktor sistemik di lingkungan kampus dapat berkontribusi dalam fenomena ini, meskipun akar masalahnya sering kali melibatkan faktor ekonomi, sosial, hingga budaya yang lebih luas. Kegagalan sistem kampus yang mampu menjerat mahasiswi dalam pekerjaan seks komersial, yaitu:

i. Kurangnya Dukungan Finansial Untuk Mahasiswi

Kenaikan biaya kuliah, kebijakan ekonomi yang kejam, dan biaya hidup yang semakin tinggi nyatanya tidak diimbangi dengan bantuan keuangan yang memadai. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat kenaikan rata-rata biaya kuliah di Indonesia sebesar 10-15% per tahun. Sementara upah minimum hanya naik 1-2%. Hal ini memperburuk beban ekonomi mahasiswa dari keluarga miskin. Hal ini mendorong mahasiswi untuk mencari penghasilan cepat, melalui pekerjaan yang berisiko. Selain itu, seringkali ditemui beasiswa yang tidak tepat sasaran. Adapun didukung lagi dengan minimnya program beasiswa atau bantuan sosial. Menjadikan fenomena ini bertransformasi menjadi jebakan dan kerusakan struktural.

Banyak kampus yang tidak menyediakan skema bantuan keuangan seperti program kerja sambil kuliah yang layak. Cara “menjual diri” ini dianggap paling mungkin meski harus menggadaikan beberapa hal selain tubuh. Studi DIKTI (2020) menunjukkan hanya 20% mahasiswa yang menerima bantuan KIP kuliah atau beasiswa lain. Sementara 30% mengaku kesulitan membayar uang semester.

ii. Lemahnya Pengawasan Dan Pembinaan Mental Mahasiswi

Lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang aman, tetapi dalam beberapa kasus justru menjadi sarana eksploitasi. Dengan bayaran bantuan akademik, akhirnya mahasiswi terjebak dalam lingkaran hubungan yang eksploitatif ini. Sayangnya, banyak kampus yang tidak memiliki mekanisme pengawasan ketat atau system pelaporan yang jelas untuk menindak kasus-kasus seperti ini. Bahkan Ketika ada laporan, seringkali ditindak secara tertutup dan tanpa sanksi yang tidak tegas. Akibatnya, budaya eksploitasi terus berlanjut.

Sistem bimbingan konseling yang tidak efektif pada kampus telah gagal mendeteksi mahasiswi yang mengalami tekanan finansial, emosional bahkan psikologis. Hal ini menjadikan perguruan tinggi sebagai pasar prostitusi. Laporan Komnas Perempuan (2021) menyebutkan bahwa kampus menjadi salah satu Lokasi perekrutan PSK oleh sindikat, terutama melalui modus “sugar daddy” atau tawaran kerja sampingan palsu. Didukung pula

oleh lemahnya pengawasan yang dibenarkan oleh riset LBH APIK (2019) menemukan 67% kampus tidak memiliki protocol jelas untuk melaporkan eksploitasi sosial.

Meskipun undang-undang pelecehan seksual telah hadir di masyarakat, banyak kampus belum memiliki protocol yang jelas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan mereka. Kampus dari awal tidak pernah menjamin keamanan dan menyuburkan kepercayaan. Lingkungan kampus yang patriarki dan penuh victim-blaming seakan-akan menjadi penjara bagi mereka yang terjebak dalam jerat pekerjaan seks komersial.

iii. Budaya Kampus Yang Tidak Melindungi & Penuh Stigma

Budaya kampus tidak memberikan perlindungan, justru menyuburkan eksploitasi. Kampus akhirnya berubah menjadi labirin penuh ancaman. Ketika fenomena ini terjadi, yang pertama kali dilakukan adalah menghadirkan budaya victim-blaming. Kejadian semacam ini sangat merugikan sebab menjadi alasan kuat mengapa masyarakat kampus hingga saat ini masih tutup mata akan isu tersebut. Alhasil universitas terjatuh pada ruang ketidakjujuran, sebab kejujuran tidak lagi dihargai. Normalisasi hubungan transaksional. Didukung oleh penelitian Universitas Indonesia (UI, 2022) mengungkap fenomena “kencan berbayar” di kalangan mahasiswi melalui aplikasi seperti Tinder atau Instagram.

Kampus masih mempertahankan budaya patriarki dan normatin yang begitu kental sehingga mudah menyinggung kaum tertentu. Budaya semacam ini mampu meminggirkan mahasiswi dari kelompok rentan. Ketidakadilan gender ini didukung oleh minimnya edukasi tentang hak-hak reproduksi, consent (persetujuan dalam hubungan seksual), dan bahaya eksploitasi seksual. Akibatnya, mahasiswi tidak memiliki tameng pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari jeratan prostitusi atau hubungan eksploitatif.

Tekanan akademik, kesulitan beradaptasi, serta masalah psikologis seperti depresi atau kecemasan kerap kali tidak terbaca oleh kampus. Layanan konseling yang tersedia begitu terbatas. Akibatnya, mahasiswi yang termakan oleh stigma tidak menemukan jalan keluar dari situasi ini. Respon kampus cenderung buta dan acuh. Mereka berakhir dengan tidak mendapat hak yang mereka butuhkan. Stigma ini bukan hanya memperkeruh kondisi, tetapi juga menjadi ruang isolasi tak ber dinding bagi mahasiswi yang terlibat PSK.

iv. Kurangnya Edukasi Tentang Hak Dan Perlindungan Diri

Minimnya layanan konseling: survei Kemenkes RI (2023) menunjukkan hanya 15% kampus di Indonesia yang memiliki layanan konseling memadai untuk masalah psikologis dan finansial mahasiswa. Banyak kampus sibuk memberi teori di kelas tetapi melupakan bekal nyata. Hal ini memvalidasi kegagalan sistemik dalam memberikan edukasi holistik mengenai hak-hak dasar mekanisme perlindungan diri. Problem epistemik ini bersifat multidimensional. Dalam konteks ini, kerentanan sosio-ekonomi mereka sering kali dieksploitasi oleh aktor-aktor yang memanfaatkan asimetri informasi dan ketiadaan jejaring pengamanan sosial.

Tidak adanya edukasi seks dan gender: berdasarkan laporan dari UNFPA (2020) mencatat 90% kurikulum kampus tidak mencakup Pendidikan kesehatan reproduksi atau pencegahan eksploitasi seksual. Lebih jauh lagi, dengan adanya hegemoni stigma patriarkal dan objektifikasi tubuh Perempuan dalam narasi sosial menciptakan lingkungan yang mempersulit mahasiswi untuk keluar dari industry eksploitatif tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dan bila harus dilakukan rekonstruksi paradigma edukasi yang bersifat transformative. Tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan normative tetapi juga membekali mahasiswa-mahasiswi dengan critical oppressive. Implementasi kurikulum berbasis hak asasi manusia, pembentukan unit krisis gender, serta kolaborasi dengan lembaga hukum dan psikososial dapat menjadi alternatif terciptanya ekosistem kampus yang mampu berfungsi sebagai ruang protektif.

v. Dampak Sosial Yang Diberikan Kampus

- a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat (2021) bahwa setidaknya 15% kasus drop out mahasiswa terkait tekanan sosial akibat stigma negatif.
- b. Penelitian UIN Jakarta (2020) menemukan bahwa 8 dari 10 mahasiswa yang terlibat PSK akhirnya berhenti kuliah karena dikucilkan atau tidak mampu menghadapi tekanan.
- c. Survei Komnas Perempuan (2022) menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 67% korban eksploitasi seksual di kampus mengalami perundungan verbal seperti mendapat julukan “perusak moral” atau “aib kampus”.
- d. Riset Pusat Krisis Terpadu UI (2021) menunjukkan 40% eks-PSK di kampus pernah mengalami gangguan kecemasan berat.

Berdasarkan narasi dan data yang disertakan, telah membuktikan bahwa kampus lebih memilih menghukum daripada memulihkan. Padahal UU No. 12/2022 tentang “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” mewajibkan kampus memberikan pemulihan bagi korban eksploitasi. Dampak yang diberi kampus tidak sesuai dengan kepahitan kasus tersebut. Sanksi yang kampus berikan justru memperparah kerentanan mereka. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip Pendidikan yang inklusif yaitu menjamin kesetaraan, akses, dan dukungan penuh bagi segenap mahasiswa-mahasiswi.

Prinsip ini hadir untuk mahasiswa tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan. Prinsip ini seharusnya masih berlaku bagi mahasiswa eks-PSK sebab kesetaraan akses bukan sekadar kesempatan yang sama, melainkan memberi dukungan sekalipun terhadap yang tertinggal. Prinsip ini bermaksud kampus harus aktif melawan stigma atau prasangka yang merugikan mahasiswa. Misalnya mulai melarang istilah “pelacur” atau “aib kampus” serta didikan untuk dosen/citivas akademik demi menghindari bias dalam evaluasi mahasiswa.

KESIMPULAN

Keterjeratan mahasiswa dalam industri seks komersial tidak dapat dilepaskan dari tekanan struktural kapitalistik. Biaya Pendidikan, inflasi dan keterbatasan lapangan pekerjaan menciptakan kondisi yang memaksa mahasiswa tenggelam dalam transaksi tubuh. Industri seks hadir sebagai penyelamat semu yang menawarkan kehidupan ekonomi yang lebih menunjang. Budaya konsumsi yang tinggi kemudian mampu menghegemoni kampus dan menciptakan paradoks antara idealisme akademik atau hasrat materialistic. Media sosial kemudian menjelma menjadi pasar industri seakan tubuh dan identitas mampu menjadi objek transaksional. Hedonism tidak lagi dipandang sebagai gaya hidup, melainkan mekanisme pertahanan diri, ukuran kesetaraan, serta kelas di mana seseorang mampu menempatkan diri dan tidak teruris dari barisan sosial.

Kampus sebagai entitas pendidikan telah gagal dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berperspektif gender. Kurangnya edukasi mengenai hak dan perlindungan diri menunjukkan pendidikan tinggi gagal menginternalisasi literasi hak manusia, kesehatan reproduksi, dan mekanisme hukum sebagai bagian dari bekal utama. Dampak sosial yang ditimbulkan kampus bersifat menyudutkan, serta lemahnya pengawasan kampus menyatakan ketidakmampuan kampus dalam membangun pendamping yang holistik. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi dan revolusi kebijakan kampus agar tidak memandang kriminal dan sadis terhadap kaum rentan terutama perempuan. Tanpa transformasi yang struktural, maka Solusi yang diharapkan hanyalah angan-angan semata. Maka Perempuan akan terus sama, ketidakadilan akan terus laris, tubuh akan semakin banyak terjual, kelemahan generasi ada di mana-mana, dan yang terburuk adalah kampus hanya akan dipandang sebagai situs reproduksi ketidakadilan alih-alih pusat pencerahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., & Nurhayati, N. (2020). Faktor Penyebab Mahasiswi Terjerat dalam Prostitusi Online di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9 (2), 123-135.
- Arifin, S. (2019). Dilema Ekonomi dan Moral: Studi Fenomena Mahasiswi yang Bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial. *Sosiohumaniora*, 21(1), 45-56.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Inflasi Pendidikan dan Biaya Hidup Perkotaan di Indonesia 2022-2023*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Pendidikan Tinggi 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/>
- Dewi, K. S., & Utami, M. S. (2021). Prostitusi Daring di Kalangan Mahasiswi: Analisis Penyebab dan Dampak Psikologis. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 32-44.
- di Kota Semarang. *Jurnal Gender dan Anak*, 7(1), 56-69.
- Rahmawati, I. (2019). Peran Media Sosial dalam Merekrut Mahasiswi ke Dunia Prostitusi.
- di Wilayah Hukum Depok. Depok: Polda Jawa Barat.
- Prasetyo, A. (2020). *Dilema Hidup Mahasiswi yang Bekerja di Dunia Prostitusi. *Jurnal DIKTI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)*. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa. Jakarta: Kemdikbud. <https://dikti.kemdikbud.go.id/>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). (2023). *Data Penerima KIP-Kuliah dan Cakupan Beasiswa PTN/PTS Tahun 2023*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Firdaus, A. (2018). Mahasiswi dan Prostitusi: Studi Kasus di Yogyakarta. *Jurnal Perempuan*, 23(3), 89-102.
- Handayani, T., & Pratiwi, A. (2022). Motivasi Mahasiswi Melakukan Prostitusi Online dalam Perspektif Teori Rational Choice. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 11(1), 67-79.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Laporan Korupsi dan Eksploitasi Seksual di Perguruan Tinggi*. Jakarta: ICW. <https://www.antikorupsi.org/>
- Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Trafficking dan Eksploitasi Seksual*
- Indraswari, L. (2017). Pergulatan Identitas: Mahasiswi yang Bekerja sebagai Pekerja Seks di Surabaya. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 3(2), 112-125.
- Jurnal Komunikasi*, 11(2), 134-147.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana*
- Jurnal Perempuan dan Anak*, 5(2), 90-103.
- Oktaviani, R. (2022). Prostitusi Online di Kalangan Mahasiswi: Kajian dari Perspektif
- Jurnal Studi Pemuda*, 8(1), 77-89.
- Nurjanah, S. (2018). Ketidaksetaraan Ekonomi dan Keterlibatan Mahasiswi dalam Prostitusi.
- Kartika, D. (2020). Prostitusi di Kalangan Perempuan Muda Berpendidikan Tinggi: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Kajian Gender*, 12(1), 55-68.
- Kekerasan Seksual. *Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 123*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes). (2023). *Survei Kesehatan Mental Mahasiswa Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes. <https://www.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Surveilans Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Populasi Kunci di DKI Jakarta*. Jakarta: Kemenkes.
- Kependudukan UGM.
- Universitas Indonesia. (2019). *Surat Keputusan Rektor UI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata*
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2021). *CATAHU 2021: Laporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://www.komnasperempuan.go.id/>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). *Catatan Tahunan: Kekerasan Seksual Berbasis Online terhadap Perempuan Muda di*
- Kompas.com*. <https://www.kompas.com/Kompas>. (2021, 15 Maret). *Dua Mahasiswi Trisakti Dikeluarkan setelah Terlibat Kasus*
- Pekerja Seks Berkedok Mahasiswi. <https://kumparan.com> LBH APIK Jakarta. (2019). *Studi*

- Mekanisme Pengaduan Kekerasan Seksual di Perguruan
Prostitusi Online. <https://www.kompas.com> Kumparan. (2023, 10 Juli). Polisi Cyber Surabaya Tutup 12 Grup Telegram Rekrutmen
- Prostitusi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 145-158. Maulida, R. (2019). Fenomena "Sugar Daddy" di Kalangan Mahasiswi: Analisis Sosiologis. Psikologi UI.
- Reproduksi di Kalangan Mahasiswi Indonesia. Jakarta: PKBI.Polres Metro Depok. (2023). Laporan Kasus Eksploitasi Seksual yang Melibatkan Mahasiswi
- Rifka Annisa. (2022). Studi Kerentanan Mahasiswi terhadap Eksploitasi Seksual di Yogyakarta. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Sahabat Perempuan. (2022). Survei Dampak Pandemi COVID-19 pada Keterlibatan Mahasiswi dalam Pekerjaan Seksual. Jakarta: LSM Sahabat Perempuan.
- Sari, M., & Wijaya, H. (2020). Faktor-Faktor yang Mendorong Mahasiswi Terlibat dalam Prostitusi. *Jurnal Kajian Sosial*, 9(1), 22-35.
- Setiawan, D. (2021). Prostitusi di Kalangan Mahasiswi: Antara Kebutuhan Ekonomi dan Stigma Sosial. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 6(2), 88-101.
- Sosial Politik, 14(2), 200-215. Putri, D. A., & Haryanto, B. (2021). Fenomena "Sugar Baby" di Kalangan Mahasiswi: Studi
- Susanti, E. (2018). Mahasiswi dan Prostitusi Online: Kajian dari Perspektif Feminis. *Jurnal Perempuan dan Gender*, 10(1), 45-58.
- Tempo. (2022). Mahasiswi dan Jeratan Prostitusi Online. Jakarta: Tempo.co. <https://www.tempo.co/Tempo.co>. (2023, 22 September). Modus Sugar Daddy di Aplikasi Kencan: Mahasiswi Jadi Target Eksploitasi. <https://www.tempo.co> terhadap Mahasiswi. Jakarta: KPAI. <https://www.kpai.go.id/Kompas>. (2020). Kasus Prostitusi Online Melibatkan Oknum Dosen Unpad. Jakarta:
- Tertib Mahasiswa. Depok: UI Press.
- Tinggi. Jakarta: LBH APIK. <https://www.lbh-apik.or.id/Lestari>, P., & Suryani, I. (2021). Dampak Sosial dan Psikologis Mahasiswi yang Terlibat
- United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia. (2020). Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Gender di Perguruan Tinggi: Tantangan dan Rekomendasi. Jakarta: UNFPA. <https://indonesia.unfpa.org/>
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Gaya Hidup Konsumtif dan Kerentanan Eksploitasi Seksual Mahasiswi. Yogyakarta: Pusat Studi
- Universitas Indonesia (UI Press). (2022). Fenomena Kencan Berbayar di Kalangan Mahasiswi: Studi Kasus di Jakarta dan Depok. Depok: UI Press. <https://www.ui.ac.id/>
- Universitas Indonesia. (2023). Dampak Keterlibatan dalam Pekerjaan Seks Komersial terhadap Prestasi Akademik Mahasiswi [Laporan Penelitian]. Depok: Fakultas
- Universitas Negeri Jakarta (UNJ). (2023). Komodifikasi Status Pendidikan dalam Industri Seks: Studi Kasus Mahasiswi di Jabodetabek. Jakarta: Lembaga Penelitian UNJ.
- Utami, W. (2022). Dampak Psikologis pada Mahasiswi yang Bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Kesehatan Mental*, 14(3), 167-180.
- Viktimologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 34-47. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). (2023). Pengetahuan Kesehatan
- Wahyuni, S. (2019). Fenomena "Sugar Dating" di Kalangan Mahasiswi: Analisis dari Teori Pertukaran Sosial. *Jurnal Studi Gender*, 8(2), 112-125.
- Yayasan Pulih. (2022). Dampak Stigma terhadap Korban Eksploitasi Seksual dari Kalangan Pendidikan Tinggi. Jakarta: Yayasan Pulih.
- Yulianti, R. (2021). Stigma dan Diskriminasi terhadap Mahasiswi yang Terlibat Prostitusi. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 76-89.